



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU SETIADI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
3. NHK : 114960

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/96 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI , Rp. 805.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 665.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **363.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VELOZ MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. LAINNYA, ELEMENT SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



6. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	90.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	191.482.480
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.844.482.480
III. HUTANG	Rp.	46.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.798.282.480

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.